

soal jang amat penting karena disinlah tempat bertumpunja segala kekuasaan negara, politik, ekonomi dan kemasjarakatan. Kalau kekuasaan negara dapat disamakan dengan bangunan suatu piramid, maka pembagian daerah pemerintahan negara dapatlah disamakan dengan batu-batu pertama jang mendjadi dasar dari pada piramid itu. Kalau batu-batu pertama jang mendjadi dasar dari pada piramid itu tidak baik susunan dan tidak kena letaknja, maka akibatnja seluruh bangunan piramid itu, sampai-sampai kepuntjaknja, bentuknja tidak kena dan kekuatannja tidak bisa tahan lama. Sebagaimana kekuatan bangunan satu piramid harus dimulai pada waktu meletakkan batu pertamanya, maka demikian djuga kesehatan suatu pemerintahan negara harus dimulai pada penentuan dasar pembagian daerah pemerintahannja. Tiap-tiap negara hendaklah menjesuaikan dasar pembagian daerah pemerintahannja dengan kenjataan-kenjataan kehidupan kebangsaan dan alamnja. Dalam suatu negara persatuan Indonesia, pembagian daerah pemerintahan negara haruslah dilakukan menurut kenjataan masjarakat Indonesia: bahwa bangsa Indonesia adalah satu bangsa bersuku jang masing-masing suku bangsa itu, sedjak ribuan tahun, sudah mendiami daerah-daerahnja jang tertentu diseluruh kepulauan kita. Wilayah Indonesia adalah kumpulan dari daerah-daerah suku bangsa. Wilayah Indonesia terdiri dari tanah Sunda, tanah Djawa, tanah Madura, tanah Bali, tanah Minahasa, tanah Bugis, tanah Minangkabau, tanah Batak, tanah Melaju, tanah

Sediwidjaja, tanah Atjeh, dan lain sebagainya, dan bukan terdiri dari "Djawa Barat", "Djawa Timur", Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, dan sebagainya. Sedjarah kita sudah dimulai ribuan tahun sebelum Belanda datang dan pergi; ribuan tahun sebelum Djepang masuk dan keluar; dan sedang kita teruskan kini. Djadi wilayah Indonesia bukanlah tanah "kosong" jang tidak bersedjarah dan tidak berpunja. Oleh karena itu, berdasarkan kenjataan-kenjataan ini, dan berdasarkan hak sedjarah suku-suku bangsa kita atas daerahnja masing-masing, maka sudah semestinja pembagian daerah pemerintahan kita dilakukan atas dasar daerah suku-suku bangsa itu. Tiap-tiap pembagian daerah setjara lain, bukan sadja berarti pelanggaran terhadap hak-hak suku-suku bangsa, tetapi djuga pelanggaran terhadap kenjataan, jang pada achirnja akan mengatjaukan susunan pemerintahan dan melemahkan negara sendiri.

Inilah dasar pembagian daerah pemerintahan jang semestinja kita pakai dan bukan pembagian sewenang-wenang sebagai dipaksakan oleh pemerintah Sukarno selama ini jang membagi-bagi tanah air kita seperti orang membagi-bagi kuwe diatas medja belaka, dengan tidak mengindahkan keadaan alam dan kepentingan suku-suku bangsa kita, se-akan-akan suku-suku bangsa kita itu tidak mempunjai hubungan apa-apa dengan daerah-daerah mereka. Dalam pembagian daerah pemerintahan ini, Sukarno adakalannja mengikuti "politik ilmu ukur" peninggalan Belanda atau membuat garis-

garis politik ilmu ukurnja sendiri. Di Djawa umpamanja, Sukarno mempertahankan politik ilmu ukur peninggalan Belanda dengan menamakan tanah Sunda sebagai "Djawa Barat" dan tanah Madura sebagai "Djawa Timur"; dengan demikian nama-nama Sunda dan Madura jang bersedjarah dan bermakna itu dikikis dari kamus ketatanegaraan kesatuan. Di Sumatera, Sukarno membuat garis-garis politik ilmu ukurnja jang baru dengan membagi-bagi Sumatera dalam tiga daerah: Utara, Tengah dan Selatan. Nama-nama jang bersedjarah dan bermakna seperti Batak, Minangkabau, Melaju, Sriwidjaja, dan lain-lain, dikikis dari ketatanegaraan. Sedang Atjeh mendapat namanja kembali dalam bentuk daerah otonomi sesudah pemberontakan jang memakan korban ribuan jiwa. Dan dengan pembagian Riau dan Djambi mendjadi daerah otonomi baru jang dilakukan dengan tergesa-gesa ketika terdjadi pemberontakan di Minangkabau itu, terbukti pula dengan seterang-terangnja bahwa politik pembagian daerah pemerintah Sukarno itu adalah berdasarkan politik memetjah dan mendjadjah belaka. Dari Sumatera kita berpindah ke Sulawesi dimana pemakaian politik ilmu ukur berachir pula dengan dilenjapkannya nama-nama suku-sukubangsa Bugis, Minahasa dan lain-lain. Hal ini berlaku untuk seluruh Indonesia ketjuali daerah suku bangsa Djawa sendiri. Keberatan kita bukan atas pemakaian nama Djawa-nja, tetapi mengapa kesempatan jang demikian tidak diberikan pula kepada suku-suku bangsa kita jang lain? Dan mengapa pula tuduhan-tuduhan

"provincialisme" hanja ditudjukan semata-mata kepada suku-suku bangsa lain, sedang kepada suku bangsa Djawa sendiri tidak?

Tudjuan dari pada politik ilmu ukur dalam penbagian daerah pemerintahan negara ialah untuk menghilangkan kesadaran dan ketjintaan orang kepada daerah dan suku bangsanja. Dengan mengikis nama-nama bersedjarah dan bermakna dari susunan ketatanegaraan dan menggantikannya dengan istilah-istilah ilmu ukur seperti utara, selatan, timur, barat, tenggara, dan sematjamnja, maka hubungan batin jang erat antara perseorangan dengan daerah dan suku bangsanja dikaburkan. "Belum pernah ada manusia panjg bisa merasakan dirinja berbangga, berpihak atau sungguh-sungguh tjinta kepada sesuatu sebutan ukuran tanah," kata Edmund burke. "Manusia tidak akan pernah merasa berbangga oleh karena ia masu[g] golongan tjak nomor 71, atau masuk golongan sesuatu tanda jang lain." ("No men ever was attached by a sense of pride, partiality, or real affection, to a description of square measurement. He never will glory in belonging to the cheques no. 71, or to any other badgeticket." *Reflections*, h. 193). Memang dalam usaha menghantjurkan suku-suku bangsa dan kepentingan-kepentingannya, politik ilmu ukur jang diikuti Sukarno ada pengaruhnja, walaupun hanja buat sementara sadja, sehingga ada putera-putera dari suku-suku bangsa jang bersangkutan jang buta politik, jang dengan sukarela menerima nama-nama baru "hadiah" Sukarno itu dan

melemparkan nama-nama bersedjarah pusaka dari nenek moyang mereka sendiri jang sudah dipelihara ribuan tahun.

Marilah kita renungkan pula utjapan Edmund Burke mengenai suasana Perantjis dizaman revolusi jang sudah lebih 150 tahun jang silam itu, tetapi jang rupanja masih mendjadi ikutan Sukarno dan pengikut-pengikutnja ditanah air kita. Berbitjara tentang keadaan dalam negeri Perantjis waktu itu, Burke menulis, "kini dibanggakan bahwa politik ilmu ukur sudah didjalankan, bahwa semua tjita-tjita kedaerahan harus dikuburkan, dan rakjat tidak boleh lagi mendjadi orang Gascons, orang Picards, orang Bretons, orang Normands, tetapi semua harus mendjadi orang Perantjis dengan satu negeri, satu hati dan satu dewan perwakilan. Tetapi kemungkinan jang lebih besar ialah bahwa penduduk-penduduk daerah-daerah itu bukan sadja tidak semuanja bisa mendjadi orang Perantjis, tetapi djuga mereka itu segera akan kehilangan negeri." ("It is boasted that the geometrical policy has been adopted, that all local ideas should be sunk, and that the people should no longer be Gascons, Picards, Bretons, Normands, but Frenchmen with one country, one heart and one assembly. But instead of being all Frenchmen, the greater likelihood is, that the inhabitants of that region will shortly have no country." *Reflections*, h.193). Walaupun perbandingan jang mutlak tidaklah dapat dilakukan antara keadaan bangsa dan negeri Perantjis dengan keadaan bangsa dan negiri kita,

tetapi banjaklah ibarat jang dapat kita ambil dari utjapan dan renungan diatas. Walaupun negeri Perantjis memang satu, - bukan terbagi-bagi atas puluhan pulau-pulau besar dan ribuan pulau-pulau ketjil seperti negeri kita, - dan bangsa Perantjis memang bangsa tunggal, - bukan bangsa bersuku seperti bangsa kita, - namun achirnja Perantjis terpaksa djuga mengadakan dua dewan perwakilan dan bukan hanja satu, yakni Dewan Rakjat dengan Senatnja. Demikian pula sistem pemilihan jang dahulunja dilakukan berdasarkan partai-partai semata-mata menuruti susunan "proportional representation" sebagaimana dilakukan dalam negara kesatuan kita sekarang jang tidak mengakui adanja daerah-daerah dan hanja mengakui adanja partai-partai, kini sistem ini sudah terpaksa dihapuskan dan ditukar dengan sistem pemilihan baru jang berdasarkan kedaerahan. Njatalah Sukarno dan kawan-kawannja mengikuti kesalahan-kesalahan jang telah pernah dibuat di Perantjis hampir setapak demi setapak. Bedanja ialah di Perantjis orang bisa beladjar dari kesalahan-kesalahannja jang sudah sudah dan mentjari djalan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, sedang Sukarno tidak beladjar apa-apa baik dari kesalahan maupun dari pengalaman.

Dalam soal pembagian daerah pemerintahan ini, bukan sadja terlibat soal pembagian tanah, tetapi djuga terlibat soal diakui atau tidaknja sifat bangsa Indonesia sebagai satu bangsa bersuku dan achirnja terlibat pula falsafah dari kebangsaan Indonesia itu. Persoalan ini sudah kita singgung disana-sini dibelakang dan karena

disini kesempatan rupanja mengemukakan dirinja pula, maka baiklah persoalan ini kita perkatakan kembali walaupun agak sedjenak. Disini kita terbentur lagi pada pertanyaan: perlukah kita menguburkan suku-suku bangsa kita untuk dapat mengadakan "satu" bangsa Indonesia? Djawaban penulis terhadap pertanyaan ini ialah, pertama, kita tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kekuasaan dan tidak mempunyai kesanggupan untuk menguburkan suku-suku bangsa kita itu, karena suku-suku bangsa itu bukanlah buatan kita, tetapi buatan Allah s.w.t. jang mendjadi kenjataan alam diseluruh dunia. Walaupun ada orang jang mau, - penulis tidak! - hal itu adalah diluar hak dan diluar kesanggupan manusia. Segala usaha jang ditudjukan kearah itu adalah usaha jang sia-sia belaka. Kedua, untuk mengadakan "satu" bangsa Indonesia, kita sama sekali tidak perlu menguburkan suku-suku bangsa kita, karena kalau jang mendjadi tudjuan jang terachir dari gerakan ke-"satu"-an itu adalah untuk menjantuni manusia-manusia itu djuga, yakni rakjat Indonesia dari suku-suku bangsa itu djuga, maka bukanlah kita tidak perlu menguburkan mereka lebih dahulu untuk dapat menjantuni mereka dan mendjamin hak-hak mereka? Djadi teranglah bahwa mereka jang beragitasi untuk menjapai kesatuan itu dengan harga apapun, malah dengan penguburan suku-suku bangsa kita, tentulah mempunyai tudjuan jang lain, yakni tudjuan untuk memperalat negara kesatuan itu untuk kepentingan sesuatu golongan jang tertentu sadja. Karena kalau jang mendjadi tudjuan dari gerakan

kesatuan itu adalah kebahagiaan *sekalian* rakjat Indonesia, jang dengan sendirinja djuga kebahagiaan *sekalian suku bangsa Indonesia*, maka hal itu bisa ditjapai dengan tidak perlu menguburkan suku-suku bangsa, dan, malah tidak bisa ditjapai kalau suku-suku bangsa itu sudah dikuburkan. Untuk mendjadi bangsa Indonesia, sebagai warga dari negara Indonesia, kita tidaklah perlu berhenti mendjadi orang Djawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Batak Bugis, dan sebagainya. Hal jang demikian, bukan sadja tidak perlu, tetapi djuga tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini kita tidaklah seharusnya berpura-pura. Dalam kehidupan kebangsaan kita sebagai bangsa bersuku, kalau ada seseorang jang mengatakan bahwa ia seorang Indonesia asli tetapi menegaskan bahwa ia tidak bercuku, maka kesan kita jang pertama ialah meragu-ragukan keasliannya, karena untuk mendjadi seorang Indonesia asli, demikian kebiasaan kita, maka seseorang tentulah mempunyai akar dari salah satu suku bangsa kita.

Seorang sahabat penulis mentjeritakan tentang seorang perwira TNI dari suku Atjeh jang gemar sekali mengatakan kepada kawan-kawannya bahwa ia bukan seorang Atjeh tetapi seorang Indonesia jang "kebetulan" dilahirkan di Atjeh. Mendengar tjeritanya dalam hati kita timbul bermacam-macam pertanyaan. Dengan mengatakan bahwa ia "kebetulan" lahir di Atjeh itu, orang ini tidak sadar bahwa ia sebenarnya sudah membuka rahsia riwayat hidupnya terlalu banjak kepada kita, budi pekertinja, tingkah-lakunja, apa jang bisa kita harapkan

dari padanja, apa jang tidak bisa kita harapkan dari padanja, sikap politiknja dan kemungkinan madju-mundurnja dalam lapangan pekerdjaannja. Dalam kehidupan manusia, pengaruh dari golongan dimana ia dilahirkan dan dibesarkan mempunyai arti jang menentukan. Sifat jang pertama dari seseorang itu tidaklah diperdapat dari kalangan kebangsaan jang luas, tetapi diperdapat, lebih-lebih di Indonesia, dari kalangan golongan suku bangsa jang terbatas dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Dapatkah kita anggap bahwa dengan "berhenti"-nja mendjadi orang Atjeh itu, maka perwira kita itu djuga menanggilkan semua adat-istiadat, tingkahlaku, budi-pekerti dan tertib-sopan Atjeh? Kalau djawabannja tidak, maka keberhentiannja itu hanja pura-pura sadja. Tetapi kalau djawabannja ja, sebagaimana mestinja, inginlah kita bertanja, maka adat-istiadat, budi-pekerti dan tertib-sopan apakah jang dipakai oleh perwira kita itu dalam pergaulannja sehari-hari didalam dan diluar Atjeh? Mungkin sekali kepada kita akan diberi djawaban bahwa perwira kita itu sedjak berhenti djadi orang Atjeh, dalam pergaulan sehari-hari ia memakai adat-istiadat dan tertib-sopan Indonesia. Tetapi adat-istiadat dan tertib-sopan Indonesia jang berdiri-sendiri terlepas dari adat-istiadat dan tertib-sopan suku-suku bangsa kita tidaklah ada! Jang bernama adat-istiadat dan tertib-sopan Indonesia itu ialah semua adat-istiadat dan tertib-sopan seluruh suku-suku bangsa Indonesia. Pada achirnja, perwira kita jang sudah melepaskan adat-istiadat Atjehnja oleh karena kesalahan

pahamnja tentang kebangsaan Indonesia, sebenarnja terpaksa mengikuti adat-istiadat sesuatu suku bangsa jang lain. Djadi ia mentjoba melepaskan dirinja dari ikatan kesukuan untuk achirnja terpaksa djuga mengikuti ikatan kesukuan jang lain. Orang-orang jang seperti ini lupa atau tidak mengetahui bahwa seorang Atjeh, seorang Batak, seorang Bugis, seorang Minangkabau, dan lain sebagainya, ke-Indonesia-annja tidak kurang aslinja dari ke-Indonesia-an seorang Djawa, Sunda atau Madura. Memelihara keaslian kita sebagai orang Atjeh, Minangkabau, Djawa, Sunda, Bali, dan sebagainya, adalah berarti memelihara keaslian masing-masing tjorak dari keaslian Indonesia. Adanja tjorak dan ragam inilah jang memperkaja kehidupan kebangsaan kita dan kesanggupan kita memelihara pusaka jang tiada ternilai ini dengan tiada mengindjak satu-sama lainlah achirnja jang akan menentukan ketinggian atau kerendahan ketertiban politik kita.

Tepat benarlah apa jang dikatakan oleh Benjamin Constant bahwa "adanja tjorak dan ragam berarti hidup; kesatuan dalam segala-galannya berarti mati". ("L La variété, c'est la vie; l'uniformité, c'est la mort." *Esprit de Conquête*, Bagian I, Pasal xiii). "Jang ditjita-tjitakan orang dizaman pertengahan, seperti di zaman Louis ke 14," tulis Edouard Laboulaye, "adalah kesatuan kesatuan dalam segala hal, dalam agama, dalam moral, dalam ilmu, dalam industri. Orang mentjari kesatuan ini dengan memakai alat jang dibuat-buat; alat ini ialah negara jang

memaksakan dan mempertahankan kesatuan-kesatuan itu. Oleh karena itu, mereka itu tidaklah mempunyai kesatuan yang sesungguhnya, yang berdasarkan atas persetujuan djiwa, tetapi kesatuan lahir sadja, yakni suatu peraturan mengenai kulit atau soal luar belaka, suatu peraturan kosong yang tidak berisi, yang rakjat dipaksakan menerimanja dengan kekerasan sendjata, dengan mematahkan segala oposisi. Rakjat tidak pertjaja, tetapi mereka menutup mulut. Inilah namanja pemerintahan dengan diam-diam dan tidak bergerak. Dimasa kita ini keadaan tidak begitu lagi. Suatu pandangan baru yang lebih tepat dan lebih baik tentang djiwa manusia telah memberikan kepada kita satu tjipta-tjipta yang lebih adil dari tjipta-tjipta kesatuan itu. Dikalangan manusia sebagai djuga dikalangan alam, kita mengakui adanja perbedaan-perbedaan yang tiada terbatas; maka yang kita tjari ialah perkumpulan dan persatuan yang seia-sekata dari anasir-anasir yang bermacam-macam itu yang dapat melahirkan persatuan yang hidup." ("L'idéal du moyen âge, comme du siècle de Louis XIV, c'est l'unité, l'unité en toutes choses, en religion, en morale, dans les sciences, dans l'industrie. Cette unité, on cherche à l'obtenir par des moyens artificiels; c'est l'Etat qui l'impose et qui la maintient. On a ainsi, non pas l'unité véritable qui tient à l'accord des esprits, mais l'uniformité, c'est-à-dire une règle extérieure, une formule vide qu'on fait accepter de vive force, en brisant toute opposition. Le peuple ne croit pas, mais il se tait; c'est la règne du silence et de l'immobilité. Aujourd'hui il n'en est plus ainsi. Une conception plus

exacte et plus vraie de l'âme humaine nous a donné une idée plus juste de l'unité. Dans l'homme comme dans la nature, nous admettons des variétés; c'est l'ensemble, c'est l'harmonie de ces notes diverses qui produit l'unité vivante que nous cherchons." *L'Etat et Ses Limites*, h.50-51).

Edouard Laboulaye sudah menulis kata-kata diatas ditahun 1871 dan sedjak itu buah pikirannya itu sudah mendjadi salah satu dogma dari falsafah demokrasi. Njatalah Sukarno ketinggalan zaman dengan tiga keturunan dalam ilmu teori politik-nja.

Kembali kepada pokok persoalan kita, yakni mengapa pembagian daerah pemerintahan dalam negara Indonesia harus berdasarkan daerah-daerah suku bangsa, dibawah ini akan kita kemukakan pula alasan-alasan politik yang lain mengapa pembagian yang demikianlah yang seharusnya dijalankan.

"Politik," tulis Max Weber, "... adalah usaha untuk ikut berkuasa atau usaha untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan itu, baik antara negara-negara atau antara golongan-golongan dalam sesuatu negara." ("Politik" würde für uns. . . : Streben nach Machtanteil oder nach Beeinflussung der Machtverteilung, sei es zwischen Staaten, sei es innerhalb eines Staates zwischen den Menschengruppen, die er umschlisst." "Politik als Beruf," *Gesammelte Politische Schriften*, h. 494). Politik internasional ialah perebutan Kekuasaan antara negara-negara; politik nasional ialah perebutan kekuasaan antara golongan-golongan dalam sesuatu negara itu. Setjara sepintas

lalu orang tentu dengan sendirinja menafsirkan tulisan Max Weber tentang "golongan-golongan" dalam sesuatu negara itu sebagai partai-partai politik. Tetapi tafsiran ini, walaupun ada kebenarannya untuk negara-negara lain, belumlah mempunyai kebenaran didunia politik Indonesia, karena di Indonesia partai-partai politik belumlah merupakan "golongan-golongan" jang benar-benar memegang kekuasaan politik sebagaimana akan kita buktikan dalam kupasan ini.

Bahwa politik dalam tiap-tiap negara adalah berdasarkan pada golongan-golongan, kini sudah semakin nyata berkat penjelidikan-penjelidikan dari ilmu sosiologi politik (political sociology), ilmu jiwa masyarakat (social psychology) dan ilmu kebudayaan bangsa-bangsa (cultural anthropology). Tidaklah dapat dibantah lagi bahwa masyarakat, termasuk masyarakat politik, adalah terdiri dari golongan-golongan, dan bukan dari perseorangan-perseorangan jang satu terlepas dari jang lainnja, sebagaimana dahulu disangka oleh Jean Jacques Rousseau.

Rousseau menjangka bahwa kehidupan seorang manusia dalam masyarakat tidak ubahnja seperti kehidupan sebutir pasir diantara butir-butir jang lain dalam satu gurun sahara, jang satu terlepas dari pada jang lainnja dan hanja negaralah jang mempersatukan semua mereka itu dalam satu ikatan. Dalam paham Rousseau, antara seorang manusia dan negaranya tidak ada terdapat ikatan-ikatan jang lain. Jang ada hanjalah perseorangan rakjat disatu pihak dan negara dilain pihak jang

mempersatukan rakjat itu. Tegasnja diantara seorang rakjat dengan negaranya terdapat satu hubungan jang langsung. Tetapi dialam kenjataan, kehidupan manusia dalam masyarakat tidaklah sesederhana itu. Kehidupan manusia dalam masyarakat satu sama lainnja tidaklah terlepas seperti halnya kehidupan butir-butir pasir digurun sahara, tetapi satu sama lainnja dihubungkan oleh bermacam-macam ikatan ke-alaman dan kemasjarakatan, seperti family, kaum, marga, suku dan bangsa jang achirnja melahirkan negara. Semua ikatan-ikatan ke-alaman dan kemasjarakatan ini bukanlah ikatan jang sia-sia sadja, tetapi semuanya mempunyai maksud-maksud dan tudjuan-tudjuan jang pasti dalam memenuhi hadjat hidup manusia dalam masyarakat, baik hadjat hidup mengenai djasmani maupun ruhani, mengenai ekonomi maupun politik. Aristoteles sudah menginsafi hal ini sedjak lebih dua ribu tahun jang silam ketika dikatakannya bahwa manusia adalah "hewan bermasyarakat". Emile Durkheim, ahli ilmu masyarakat jang ternama itu, malah berdjalan lebih djauh dan lebih tegas lagi ketika dikemukakannya bahwa manusia asli itu bukanlah "hewan" jang hidup sendiri-sendiri setjara perseorangan, tetapi manusia asli itu adalah satu "Kenjataan kemasjarakatan". Segala sifat-sifat kemanusiaan jang membuat seseorang manusia itu mendjadi suatu makhluk jang berbudi adalah hasil dari pergaulan dan kehidupan bersama. Manusia dan masyarakatnja tidaklah dapat dipisah-pisahkan. Untuk menerangkan apakah manusia itu, demikian Durkheim,

kita memerlukan dua anasir: yakni, unsur djasmani dari manusia itu dan unsur golongan masyarakat dimana manusia itu dibesarkan dan hidup. "Manusia yang kita pandang sebagai perseorangan itu adalah digerakkan dan diatur oleh perhubungannya dengan manusia-manusia yang lain," kata John Dewey. "Apakah yang dilakukannya dan apa akibat dari pada tingkah-lakunya, apa pengalamannya, semuanya tidaklah bisa diterangkan, apalagi diperhitungkan, terlepas atau terpentil dari manusia-manusia lain." ("The human being whom we fasten upon as individual *par excellence* is moved and regulated by his association with others; what he does and what the consequences of his behavior are, what his experience consists of, cannot even be described much less accounted for, in isolation." *The Public and Its Problems*, h. 188).

Djadi jelaslah bahwa manusia tidaklah dapat dipisahkan dari masyarakatnya, karena manusia hanya hidup dalam masyarakat. Kita tidak pernah mendapati manusia hidup diluar masyarakat. Demikian pula masyarakat itu terbagi-bagi atas golongan-golongan atau lebih tepat terdiri dari golongan-golongan. Segala kebutuhan rohani dan djasmani dari masing-masing manusia itu didjelmakan melalui golongannya masing-masing. Yang kita maksudkan dengan "golongan" ialah kumpulan orang-orang yang mempunyai banjak persamaan dalam sifat-sifat dan pribadi mereka, serta menganut sikap yang bersamaan dalam berbagai keadaan yang mereka hadapi sehingga membuat mereka bersatu dalam

soal-soal politik dan ekonomi. Adanya "golongan-golongan" itu dalam masyarakat tidaklah bergantung pada adanya organisasi yang resmi dari golongan-golongan itu, karena organisasi resmi tidaklah merupakan syarat bagi adanya golongan-golongan, walaupun adanya organisasi resmi mungkin mempengaruhi jalannya kegiatan golongan-golongan itu. Adanya golongan-golongan dalam masyarakat adalah suatu kenyataan yang pengaruh dan kekuasaannya atas anggota-anggotanya dapat dilihat dan dibuktikan. Tjontoh dari pada golongan-golongan yang paling nyata dan yang paling berpengaruh dikalangan bangsa kita ialah golongan-golongan suku bangsa kita yang walaupun tiada mempunyai organisasi yang resmi tetapi mempunyai pengaruh yang djauh lebih besar dan pada hakikatnya mempunyai pengaruh yang menentukan dalam perkembangan politik di Indonesia lebih dari partai-partai politik yang mempunyai organisasi resmi itu. "Tidaklah dapat dielakkan," tulis Professor David Truman, "untuk menerima golongan-golongan itu sebagai terletak didjantung-hati soal pemerintahan." ("... acceptance of groups as lying at the heart of the process of government is unavoidable." *The Governmental Process*, h. 46). Professor Earl Latham telah mengatakan pula bahwa "mengakui golongan-golongan sebagai dasar masyarakat, dan dengan sendirinya djuga mengakui golongan-golongan itu sebagai dasar politik dan dasar kemasyarakatan yang lain, tidaklah berarti melupakan perseorangan. Adanya golongan-golongan adalah untuk kepentingan perseorangan-perseorangan yang mendjadi

anggotanja. Golongan-golongan adalah alat dari perseorangan untuk memenuhi nilai-nilai kehidupan dan kebutuhannya." ("To recognize the group basis of society and, by inclusion, the group basis of the political and other communities, is not to lose sight of the individual. The groups exist for the individuals to whom they belong. Groups are devices by which the individual fulfilled personal values and felt needs." *The Group Basis of Politics*. h. 13).

Mungkin ada pula orang-orang yang mengemukakan bahwa memandang golongan-golongan sebagai dasar politik akan merugikan kepentingan negara, se-akan-akan negara mempunyai kepentingannya yang tersendiri yang terlepas dari kepentingan golongan-golongan rakyatnya. Sebagaimana telah kita bitjarakan dibelakang, pendapat-pendapat yang demikian adalah berdasarkan pada dugaan-dugaan yang salah, karena negara tidaklah mempunyai kepentingannya yang tersendiri terlepas dari kepentingan golongan-golongan rakyatnya. Negara adalah alat dari rakyat dan bukan sebaliknya. Kalau negara dapat disebut mempunyai kepentingannya, maka kepentingan itu ialah kumpulan dari segala kepentingan golongan-golongan yang terdapat dalam negara itu, yang kesemuanya harus dipelihara dan diperlindungi dengan adil oleh negara. Oleh karena itu kepentingan negara tidaklah dapat bertentangan dengan kepentingan golongan-golongan rakyatnya. "Memang dakwaan bahwa dalam sesuatu bangsa atau negara itu ada terdapat sesuatu kepentingan

yang mutlak mempunyai arti yang dalam," kata Professor David Truman." Lebih-lebih dimasa krisis... dakwaan-dakwaan yang demikian bisa menjadi alat yang berguna sekali bagi sesuatu golongan yang terbesar atau kumpulan beberapa golongan, dalam usaha melemahkan atau menghanturkan kepentingan golongan-golongan yang melawannya." ("There is a political significance in assertions of a totally inclusive interest within a nation. Particularly in times of crisis... such claims are a tremendously useful promotional device by means of which a particularly extensive group or league of groups tries to reduce or eliminate opposing interests." *The Governmental Process*, h. 50).

Sekarang sampailah kita pada pokok persoalan yang hendak penulis bitjarakan dalam bab ini, yakni, mengenai dasar kekuasaan politik dalam masyarakat kita. Dewasa ini dalam masyarakat kita terdapat dua matjam golongan: pertama, golongan-golongan yang bersedjarah dan yang bersifat ke-alaman, yang telah didjadikan oleh Allah, yakni, golongan suku-suku bangsa kita. Kedua, golongan-golongan buatan manusia sendiri dengan maksud yang tegas-tegas untuk mendjalankan kekuasaan politik dalam negara kita, yakni, golongan partai-partai politik. Maka diantara kedua matjam golongan ini, golongan manakah yang sebenarnya dan pada hakikatnya menjadi dasar kekuasaan politik dalam negara kita sekarang? Apakah golongan suku-suku bangsa atau golongan partai-partai?

Barangkali djawaban yang semudah-mudahnya ialah

mengatakan bahwa sudah tentu golongan matjam kedualah, yakni golongan partai-partai politiklah yang menjadi dasar kekuasaan politik dalam negara kita apalagi dalam negara kesatuan yang sekarang yang sama sekali tiada mengakui adanya golongan pertama yaitu golongan suku-suku bangsa itu. Tetapi bila kita meninjau lebih lanjut dan melihat lebih dalam, maka akan terjatalah bahwa kekuasaan politik di Indonesia tidaklah berdasarkan pada "kekuasaan" partai-partai politik yang dibuat-buat itu, tetapi sebaliknya berdasarkan pada kekuatan golongan-golongan pertama, yakni, golongan suku-suku bangsa. Paling banjak partai-partai politik ditanah air kita baru merupakan anasir yang kedua atau yang ketiga, - sesudah pemuka-pemuka partai, - dalam pertjaturan politik dalam negeri kita. Partai-partai politik hanya baru berkuasa diatas kertas sadja, namanja sadja, merek belaka, sedang kekuasaan yang sebenarnya dilakukan dibelakang "tirai kertas" itu oleh golongan-golongan suku bangsa yang mengendalikan partai-partai itu. Oleh karena itu, perkembangan politik di Indonesia tidaklah bisa dimengerti, apalagi diterka dengan berdasarkan politik partai-partai, karena kekuasaan yang menentukan tidaklah terletak dalam partai-partai itu, tetapi diluarnja, yakni ditangan partai-partai dalam bentuk yang lain, partai-partai yang tidak resmi, yang oleh negara kesatuan tidak diakui dan malah dipura-purakan sebagai tidak ada sama sakali, yakni dalam tangan golongan-golongan suku-suku bangsa dan orang-orang yang berpengaruh dikalangan suku-suku bangsa itu.

Professor Freund adalah benar sekali ketika dikatakannya bahwa "mempeladajari politik berarti mempeladajari pengaruh dan siapa yang berpengaruh." ("The study of politics is the study of the influence and the influential.") Terhadap utjapan ini kita dapat menambahkan pula bahwa mempeladajari politik ialah mempeladajari "kekuasaan" dan siapa yang sebenarnya "berkuasa". Bahkan sebagaimana makin sehari makin diinsafi oleh ahli-ahli ilmu politik, atjara yang terutama dari ilmu politik itu ialah "kekuasaan" dan bukan "pemerintahan", karena pemerintahan itu hanya salah-satu diantara djalan-djalan lain dalam mendjalankan kekuasaan itu. Hal ini perlu benar diinsafi lebih-lebih dalam memahami politik Indonesia, karena djika tidak, kita akan tertipu oleh topeng dari pada pemain-pemain wajang yang memakai berbagai-bagai muka dan nama untuk menjembunjikan muka, nama dan maksudnja yang sebenarnya. Bila kita sudah memahami dimana letaknya "kekuasaan" dan siapa yang "berkuasa" dalam politik Indonesia, maka akan terjatalah sebenarnya tidak ada keadjaiban dalam politik Indonesia, segala yang terdjadi sekarang akan dapat dimengerti dan perkembangannya dimasa yang akan datang akan dapat diperhitungkan atau diterka dan akan dapat pula diketahui letaknya kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki.

Sebagai akibat dari pada "falsafah" negara kesatuan yang berdasarkan pada fantasi dan bukan pada kenyataan-

kenyataan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa bersuku itu, maka negara kesatuan tidaklah mengakui adanya golongan-golongan suku bangsa dan satu-satunya golongan yang diakui dalam masyarakat Indonesia ialah golongan bikinannya sendiri yaitu golongan partai-partai politik. Golongan partai-partai politik inilah yang dengan resmi diakui dan dinjatakan sebagai dasar kekuasaan politik dalam negara kita: sedang "partai-partai" yang sudah ada lebih dahulu yang sudah dijadikan oleh kodrat alam dan yang sudah lebih dahulu ada dari pada negara kesatuan itu sendiri, yakni golongan-golongan suku-suku bangsa, dipandang sebagai tidak ada saja. Maka atas dasar partai-partai atau lebih tegas golongan-golongan yang dibikin-bikin diatas kertas saja inilah, dengan tiada memahami anasir-anasir sosiologi yang terlibat dalam sesuatu sistem politik, maka seluruh perumahan negara kesatuan dan pembagian kekuasaannya sudah dilakukan. Mulai dari sistem pemilihan umum, sampai kepada parlemen dan kabinet didasarkan atas partai-partai itu. Akibatnya bangunan negara kesatuan tidak ubahnya sebagai suatu bangunan yang dibangun diatas kertas belaka.

Sistem pemilihan yang dengan mutlak didasarkan atas partai-partai saja itu dengan sendirinya melahirkan satu parlemen yang tidak mewakili rakyat Indonesia yang pertama-tama terdiri dari suku-suku bangsa itu dan dengan demikian kepentingan suku-suku bangsa yang sudah terhundjam sedjak ribuan tahun ditiap-tiap pelosok

bumi Indonesia tidaklah diwakili dalam parlemen yang sebenarnya sudah menjadi borongan gembong-gembong politik yang duduk di Djawa yang mendapat kesempatan mengendalikan partai-partai dan negara. Akibatnya ialah timbulnya satu parlemen yang tidak benar-benar parlemen, satu parlemen yang tidak mempunyai penghargaan rakyat dan satu parlemen yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Karena parlemen itu didasarkan atas partai-partai yang sebenarnya tidak berkuasa, maka parlemen itu pun dengan sendirinya tentu tidak mempunyai kekuasaan pula. Maka kita lihatlah, umpamanya, walaupun Undang-Undang. Dasar negara kesatuan menegaskan bahwa Kabinet adalah bertanggung jawab kepada Parlemen dan hidup-matinja sesuatu Kabinet adalah ditentukan oleh Parlemen dengan memajukan pernyataan-pertjaja atau tidak-pertjajanya terhadap sesuatu Kabinet itu, semua ini adalah omong-kosong dan berlakunya hanya diatas kertas belaka. Kenyataannya ialah walaupun negara kesatuan sudah mengalami sampai 18 kali krisis Kabinet dalam waktu 13 tahun merdeka ini, tidak ada satu Kabinet-pun pernah jatuh oleh karena pernyataan tidak-pertjaja dari Parlemen. Semua Kabinet itu sudah dijatuhkan, bukan oleh Parlemen, - yang menurut Undang-Undang Dasar adalah satu-satunya kekuasaan yang dapat melakukannya, - tetapi oleh kekuasaan lain diluar Parlemen. Dengan ini terjatalah bahwa kekuasaan yang sesungguhnya, yang menentukan, dalam politik Indonesia dalam negara kesatuan yang sekarang tidaklah terletak ditangan Parlemen atau ditangan partai-partai,

atau ditangan Kabinet, tetapi diluar Parlemen rasmi, diluar Kabinet rasmi dan diluar partai-partai rasmi. Partai-parti, pemilihan umum, Parlemen, dan Kabinet negara kesatuan pada hakikatnja tidak lain dari pada "tirai kertas" belaka bagi sesuatu kekuasaan jang lain diluar partai-partai, diluar Parlemen dan diluar Kabinet jang memperalat partai-partai, Parlemen dan Kabinet itu untuk menjelubungi kekuasaannya jang sewenang-wenang itu dengan tjap demokrasi.

Dalam negara kesatuan sekarang kekuasaan jang sebenarnya, jang menentukan segala-galannya, terletak ditangan golongan suku bangsa jang terbesar dan bukan ditangan partai-partai, Parlemen atau Kabinet, tegasnja *ditangan suku bangsa Djawa dan mereka jang berpengaruh dikalangan suku bangsa tersebut*. Oleh karena dewasa ini Sukarno adalah sebagai orang jang paling berpengaruh dikalangan suku bangsa Djawa, maka berkat demokrasi "primitive" jang dipaksakannya atas bangsa kita, sebagaimana telah kita bitjarakan dibelakang, dia-lah orang jang berkuasa dalam negara kesatuan. Hal ini sebenarnya tidak perlu diterka lagi, karena sudah terlalu terang-benderang sedjak Sukarno dengan mudah sadja mengengjampingkan Parlemen dan "membebaskan" Kabinet boneka Djuanda dari bertanggung-djawab kepada Parlemen itu; sedjak Sukarno memaksakan "Dewan Nasional"-nja atas susunan ketatanegaraan kita; sedjak Sukarno memaksakan "demokrasi terpimpin"-nja, - atau lebih tepat "demokrasi-salah-pimpin!"-nja, - atas pundak

bangsa Indonesia; sedjak Sukarno menjuruh pulang Dewan "Konstituante" jang memang tidak keruan itu; dan paling achir dengan pengumuman kemauannya untuk mentjampakkan Undang Undang Dasar Sementara negara kesatuan sekarang jang memang "primitive" itu untuk kembali ke Undang Undang Dasar tahun 1945 jang lebih "primitive" lagi! Njatalah jang berlaku di Indonesia bukanlah kemauan rakjat, bukanlah kemauan partai-partai, bukanlah kemauan Parlemen, dan bukanlah kemauan Kabinet, tetapi adalah kemauan Sukarno!

Teranglah kekuasaan Sukarno itu tidaklah berdasarkan atas sesuatu "sakti" atau atas sesuatu kekuasaan gaib jang tidak dapat diterangkan dan diketahui asal-usulnja. Kekuasaan jang terkumpul ditangan Sukarno kini adalah hal jang biasa dalam suatu sistem politik "primitive" jang sudah dipaksakannya atas Indonesia. Selama sistem ini tetap berlaku maka Sukarno jang sekarang akan dapat digantikan pula oleh sukarno-sukarno jang akan datang.

Untuk mengaburkan keadaan jang sebenarnya tentang kedudukan kekuasaan dalam politik Indonesia, kepada kita sering ditondjol-tondjolkkan nama-nama dari berapa orang "seberang" jang menduduki kursi-kursi tinggi dalam pemerintahan Sukarno. Pada hal mereka ini tidak lain dari pada "buruh" Sukarno belaka dan mereka mendapat kedudukan-kedudukan itu hanja atas "belas-kasihan" Sukarno pula. Duduknja mereka dalam pemerintahan negara kesatuan tidaklah merobah sifat negara kesatuan dan tidaklah mengurangi penguasaan

("hegemony") dari suku bangsa Djawa dalam negara kesatuan. Mereka akan tetap dipakai selama mereka tetap patuh pada perintah pemerintah pusat dan berguna dalam memajukan kepengtingan politik golongan jang terbanjak. Pada umumnja mereka dipakai sebagai boneka untuk menentang golongannja sendiri. Bilamana pegawai-pegawai ini tidak lagi melajani kepentingan mereka jang berkuasa dipusat, seketika itu pula mereka akan dilepaskan dari djabatannja. Adanja mereka dalam pemerintahan tidaklah mempengaruhi keputusan politik jang menentukan dari pemerintah negara kesatuan. Bahkan adanja djenderal-djenderal jang berasal dari "seberang" dalam kalangan militer Sukarno tidaklah mempengaruhi djalannja politik pemerintah Sukarno sebagaimana adanja djenderal Abdul Kadir Widjojatmodjo dikalangan tentera Hindia Belanda dahulu tidaklah mempengaruhi politik pemerintah Belanda terhadap Indonesia.

Kekuasaan Sukarno berdasarkan atas kekuasaan golongan suku bangsa Djawa jang diperdapat melalui sistem negara kesatuan jang pada hakekatnja sudah memindahkan 100% kekuasaan politik di Indonesia, jakni kekuasaan jang menentukan segala-galannja, ketangan suku bangsa Djawa. Selama sistem ini tetap berlaku, maka selama itu pula Sukarno akan dapat tetap berkuasa, walaupun seluruh bangsa Indonesia berontak kepadanya, walaupun seluruh Indonesia mendjadi lautan api. Unutk mempertahankan kekuasaan legalnja, Sukarno tidak

memerlukan walaupun satu suara dari tanah "seberang". Sebagaimana dahulunya kerusuhan politik di Indonesia tidak dapat membuat krisis kabinet atau pergantian pemerintahan di Den Haag, demikian djuga sekarang, kerusuhan politik diluar Djawa, betapapun hebat dan sedih akibatnja dirasakan oleh suku-suku bangsa jang bukan Djawa, tidaklah akan dapat mempengaruhi pemerintah pusat dan tidaklah akan membuat krisis kabinet di Djakarta.

Untuk mempertahankan kekuasaanja Sukarno tidaklah memerlukan bantuan partai-partai politik, karena memang partai-partai politik itu tidaklah berkuasa apa-apa, ketjuali Partai Komunis, karena Partai Komunis bukanlah suatu partai politik dalam arti jang biasa tetapi suatu organisasi setengah-militer jang terang-terangan bertudjuan untuk merebut kekuasaan negara dan terang-terangan mendjadi alat dari suatu negara asing, jaitu Sovjet Rusia. Kalau partai-partai seperti P.N.I. dan N.U. mempunyai pengaruh, pengaruh itu tidaklah ditjapai oleh kekuatan partai-partai itu sendiri, tetapi oleh karena partai-partai itu adalah partai-partai jang dapat disebut sebagai kepunjaan suku bangsa Djawa, karena sebagian jang terbesar sekali dari anggota-anggota partai-partai itu terdiri dari suku bangsa Djawa. Tegasnja pengaruh dari partai-partai tersebut diperdapat karena ke-Djawa-annja dan bukan karena ke-ulama-annja atau ke-nasional-annja. Andainja partai-partai tersebut mempunyai djumlah anggota jang sebanjak itu djuga tetapi anggota-anggota itu bukan terdiri dari suku Djawa

maka pengaruh dari partai-partai itu tidaklah akan sebesar jang sekarang. Dalam hubungan ini, kenjataan bahwa sebagian jang terbesar sekali dari anggota-anggota Partai Komunis-pun terdiri dari suku Djawa mempunyai arti jang besar, karena hal ini menjebabkan sangat bertambahnja kekuatan partai Komunis di Indonesia. Dilihat dari asal-usulnja dan sifat keanggotaannja, ketiga partai ini sebenarnja adalah partai-partai setempat jaitu partai-partai dari Djawa Tengah dan Djawa Timur sadja dan belumlah dapat dinamakan sebagai partai se-Indonesia, karena anggota-anggota dari partai-partai itu jang diluar Djawa Tengah dan Djawa Timur adalah sedikit sekali bila dibandingkan dengan anggota-anggotanja dikedua daerah tersebut, sehingga anggota-anggota jang diluar dari daerah suku Djawa itu tidaklah mempengaruhi politik pimpinan partai-partai tersebut. Pimpinan semua partai-partai tersebut pada umumnya dipegang sendiri oleh suku Djawa dengan tambahan disana-sini dengan orang-orang "seberang" jang sebenarnja sudah berhidjrah untuk selama-lamanja ke Djawa sehingga jang terachir ini sebenarnja tidak dapat disebut lagi sebagai wakil rakyat "seberang" jang terus hidup di "seberang".

Oleh karena ketiga-tiga partai ini bertumpu pada suku bangsa Djawa maka tidaklah dapat mereka elakkan untuk lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan suku Djawa dari pada kepentingan-kepentingan suku-suku bangsa lainnja. Maka kita lihatlah ketiga-tiganya, walaupun mempunyai ideologi jang berlain-lainan, selalu

bersatu dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan suku bangsa Djawa sadja walaupun dalam hal ini terlibat ketidak-adilan terhadap suku-suku bangsa Indonesia jang lain, unpamanja sikap ketiga-tiga partai ini dalam mempertahankan tatanegara kesatuan jang sekarang. Suatu tjontoh jang menarik hati pula ialah peristiwa pemilihan ketua Parlemen beberapa waktu jang lalu, dimana ketiga-tiga partai ini, P.N.I., P.K.I. dan N.U., bersatu-padu dalam memilih satu tjalon jang mereka anggap tjukup mendjamin kepentingan-kepentingan golongan suku Djawa, yakni Sartono. Kedjadian ini sangat penting karena sebagai kita ketahui ketua Parlemen dalam negara kesatuan mempunyai kedudukan sebagai bakal Presiden; andainja ada sesuatu jang terdjadi atas Sukarno, maka suku bangsa Djawa sudah siap dengan penggantinya! "Mempertahankan kepentingan diri-sendiri adalah hukum jang tertinggi jang berlaku pada golongan-golongan sebagaimana djuga pada perseorangan-perseorangan," kata John C. Calhoun. ("Self-preservation is the supreme law, as well with communities as individuals." "A Disquisition on Government," *Works*, djilid I, p. 10).

Sebenarnja ketiga-tiga partai diatas, oleh karena sifat keanggotaannja jang bertumpu hanya pada satu suku bangsa atau pada satu daerah sadja, maka dalam susunan ketatanegaraan kesatuan sekarang, partai-partai itu tidaklah menambah demokrasi bagi Indonesia, tetapi merupakan alat-alat lain pula jang mempunyai akibat menambah kekuasaan suku bangsa Djawa atas suku-suku bangsa lain diseluruh Indonesia. Partai-partai ini

menambah "tabir kertas" jang menjelubungi penjerobotan kekuasaan dan hak rakjat daerah oleh pemerintah pusat dan menutup-nutup "centralisme" jang diadakan oleh negara kesatuan; sedang bagi Sukarno, "nama" partai-partai ini dapat dipergunakan untuk menguatkan kedudukannya, karena mengakui dirinja disokong oleh partai-partai P.N.I., P.K.I. dan N.U. itu tentulah lebih "demokratis" daripada dengan terus-terang mengakui dirinja disokong oleh suku Djawa sadja, walaupun pada hakikatnja ketiga-tiga partai itu adalah partai-partai suku Djawa sendiri.

Barangkali satu-satunya partai jang bukan partai setempat di Indonesia ialah Masjumi karena keanggotaannya tidaklah bertumpu pada satu daerah semata-mata, tetapi benar-benar tersebar dan terdiri dari berbagai suku bangsa jang terdapat diberbagai daerah. Demikian djuga dalam pimpinannya terdapat lebih banjak tenaga-tenaga dari "seberang" dibandingkan dengan ketiga-tiga partai diatas. Berdasarkan kenyataan-kenyataan diatas, yakni keanggotaan dan pimpinannya, maka Masjumi-lah satu-satunya partai jang dapat disebut sebagai partai se-Indonesia dimana golongan-golongan jang bukan Djawa-pun tjukup diwakili. Dan oleh karena sifat keanggotannya ini pula maka Masjumi lebih merasai kepentingan-kepentingan rakjat daerah dari pada ketiga-tiga partai diatas. Hal ini bukan disebabkan oleh soal bidjaksana atau baik hati belaka, tetapi dipaksakan oleh anasir keanggotaannya. Oleh karena politik Masjumi berdasarkan pada penjantunan kepentingan jang lebih

luas itu maka kita sering melihat betapa partai-partai P.N.I., P.K.I. dan N.U. bersama-sama menentang politik Masjumi. Dalam politik, tiap-tiap kerdjasama mestilah dilahirkan oleh adanya kepentingan bersama. Apakah kepentingan bersama antara P.N.I., P.K.I. dan N.U. kalau bukan kepentingan ke-Djawa-an? Untuk memahami tindakan-tindakan politik dari sesuatu partai, kita tidak perlu mendengar pidato-pidato atau "chutbah-chutbah" dari pemuka-pemuka partai-partai jang bersangkutan, tetapi jang mesti kita lakukan ialah menjelidiki akibat-akibat jang njata dari tindakan-tindakan politik mereka, karena orang tidaklah mengambil sesuatu tindakan politik ketjuali dengan tudjuan untuk melahirkan hasil-hasil atau akibat-akibat jang dikehendakinja. Dalam politik, *sebab* dan *akibat* adalah sama pentingnja sebagai dalam ilmu alam. Lebih-lebih politik partai N.U. jang lebih suka bekerjasama dengan P.N.I.-jang tidak berdasarkan Islam dan jang menentang pelaksanaan hukum Islam, - dan dengan P.K.I. - jang terang-terangan memusuhi Islam, - dalam menentang Masjumi, - satu partai Islam jang lain, - membawa kita kepada kesimpulan bahwa di Indonesia, kepentingan golongan suku bangsa itu bukan sadja mengatasi kepartaian, tetapi djuga mengatasi kepentingan ke-agama-an.

Bahwa di Indonesia ikatan kesukuan itu lebih kuat dari ikatan kepartaian terbukti lagi selama peristiwa pemberontakan P.R.R.I. Pemberontakan P.R.R.I. antara lain dapat disebut sebagai pemberontakan Masjumi.

Tetapi dalam peristiwa ini kita lihat partai Masjumi terbelah dua: pemuka-pemuka Masjumi jang bukan bersuku Djawa ikut memberontak dengan suku-suku bangsanja masing-masing; sedang pemuka-pemuka Masjumi jang bersuku Djawa, - dengan alasan-alasan tentu sadja, - tidak mau ikut memberontak. Peristiwa ini, antara lain, membuktikan kepada kita bahwa ikatan kesukuan dialam kenjataan, lebih besar pengaruhnja dalam pertjaturan politik Indonesia dari pada ikatan kepartaian jang dalam teori seharusnja menentukan sikap politik seseorang. Dalam politik, pemberontakan atau peperangan adalah batu udjian jang terachir jang menentukan kesetiaan politik seseorang. Disini orang tidak dapat berpura-pura lagi. Tepat benarlah apa jang dikatakan oleh Max Weber, bahwa tiap-tiap orang politik pada suatu waktu akan mendapati dirinja dipaksa oleh keadaan untuk mengambil sesuatu keputusan jang berat dan sesuatu tindakan politik jang tidak dapat dielakkannya. Akan sampailah waktunja bagi mereka jang batinnja belum mati untuk berkata: "Saja tidak dapat berbuat lain; disinilah saja berdiri." ("Ich kann nicht anders, hier stehe ich." "Politik als Beruf," *Gesammelte Politische Schriften*, p. 494). Tetapi di Indonesia ternjata bahwa waktu untuk mengambil sikap politik ini datangnja berbeda-beda walaupun dikalangan anggota-anggota dari satu partai politik. Dengan lain perkataan, partai politik jang dalam teorinja diadakan tidak lain dari pada untuk menjatukan tindakan politik, dialam kenjataan, bila waktu untuk bertindak itu sampai, partai politik itu malah

tidak mempunjai arti sama sekali. Maka kita lihatlah umpamanja, waktu sebagian besar anggota-anggota dan pemuka-pemuka Masjumi jang bukan suku Djawa memutuskan untuk memberontak terhadap pemerintah Sukarno, pemuka-pemuka dan anggota-anggota Masjumi dari suku Djawa tidaklah mau ikut serta. Apakah jang menjebabkan perbedaan sikap politik jang sangat "menjolok" mata ini? Dapatkah peristiwa jang sematjam ini dianggap sebagai satu "kebetulan" belaka? Pada hemat penulis, ini bukanlah satu kebetulan, karena kedjadiannja bukanlah terbatas padasatu-dua orang sadja. Kedjadian ini menundjukkan suatu *ragam* dari politik di Indonesia jang untuk kesekian kalinja membuktikan lagi kebenaran pendapat jang kita kemukakan disini, yakni, bahwa politik di Indonesia bukan berdasarkan pada partai-partai tetapi berdasarkan pada golongan-golongan suku bangsa. Pada achirnja bukan partainja jang menentukan sikap politik seseorang, tetapi kedudukan suku bangsanja dalam sesuatu krisis jang dihadapi, Hal ini berlaku bagi semua suku-suku bangsa Indonesia. Berdasarkan pada keadaan ini, maka sikap orang-orang Masjumi jang berasal dari suku Djawa daptlah dipahami: Bagi mereka ini, kekuasaan Sukarno tidaklah merupakan antjaman jang sesungguhnya terhadap kepentingan-kepentingannja atau kepentingang darimasjarakat dimana mereka hidup, yakni, masjarakat Djawa. Mungkin mereka djuga tiada menjetudjui politik Sukarno jang terang-terangan tidak adil terhadap hak-hak rakjat daerah lain, tetapi ketidakadilan ini tidaklah dirasakan sebagai

suatu ketidak-adilan atas diri mereka sendiri jang memaksa hati-ketjil mereka berontak sebagaimana jang dirasakan oleh suku-suku bangsa jang lain. Hal jang sematjam ini adalah suatu hal jang lumrah, suatu hal jang biasa dan jang dapat terdjadi dalam masjarakat bangsa bersuku. Hal jang sematjam ini djuga mempunjai kebenaran terhadap suku-suku bangsa jang lain, seandainja mereka ditempatkan dalam keadaan jang sama sebagai kedudukan suku bangsa Djawa dalam keadaan krisis jang sekarang.

Dikalangan pimpinan partai-partai P.N.I. dan N.U. tidaklah terdjadi sesuatu perpetjahan sebagai dikalangan Masjumi dalam menghadapi pemberontakan suku-suku bangsa jang bukan Djawa dewasa ini, karena sebagai telah kita kemukakan dibelakang, kedua-dua partai ini pada hakikatnja adalah partai-partai suku Djawa sendiri jang dipimpin oleh pemuka-pemuka Djawa sendiri pula sehingga tidak timbul persoalan perbedaan kesetiaan dalam pimpinan sebagai dialami dalam Masjumi. Seandainja P.N.I. dan N.U.-pun mempunjai anggota-anggota terbanjak dikalangan suku-suku bangsa jang kini ikut memberontak, pasti kedua partai itupun tentu akan mengalami perpetjahan sebagai jang dialami oleh Masjumi.

Suatu tjontoh jang lain pula jang menggambarkan bahwa politik di Indonesia tidaklah berdasarkan kepartaian tetapi berdasarkan golongan suku-suku bangsa dapat kita perhatikan, umpamanja, ketika pemberontakan P.R.R.I. petjah di Minangkabau, maka kebanyakan putera-putera

Minangkabau jang bekerdja pada perwakilan-perwakilan Indonesia diluar negeri memilih pihak P.R.R.I., walaupun mereka mendjadi anggota dari berbagai-bagai partai politik jang tiada tahu-menahu tentang pemberontakan itu. Tetapi ikatan mereka sebagai suku bangsa Minangkabau lebih kuat dari pada ikatan kepartaiannja. Demikian djuga halnja dengan putera-putera Minahasa, Bugis, Batak, Atjeh dan sebagainya. Dan oleh karena suku-bangsanja sendiri tidak terlibat dalam tragedie pertumpahan darah sekarang maka kita lihat pula betapa tak atjuhnja pemuka-pemuka politik dari suku bangsa Djawa, terutama Sukarno sendiri jang lebih mementingkan pelantjongan, terhadap penderitaan suku-suku bangsa kita jang telah dipaksa berontak oleh politik Sukarno sendiri.

Kesimpulan dari pembitjaraan kita sebegitu djauh dalam bab ini ialah bahwa ditanah air kita, politik dialam kenjataan, tidaklah berdasarkan pada golongan-golongan jang berbentuk partai-partai, tetapi berdasarkan pada golongan-golongan jang berwujud suku-suku bangsa. Ini bukanlah suatu hal jang tidak semestinja, tetapi adalah suatu hal jang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa jang bersuku. Partai-partai politik jang baru kita dirikan itu tidak sanggup menandingi pengaruh dan kepentingan-kepentingan jang bersangkutan-paut dan sangat mendalam jang sudah ribuan tahun umurnja jang terdapat dalam golongan suku-suku bangsa kita itu. Oleh karena partai-partai di Indonesia pada hakikatnja tidaklah berkuasa,

maka kita tidaklah dapat mendasarkan pemerintahan negara kita, tegasnja pemilihan umum, parlemen, dan kabinet atas dasar *kepartaian semata-mata* dalam bentuknja jang sekarang. Sebaliknya sebagaimana telah kita buktikan, kenjataannja ialah bahwa politik di Indonesia sebenarnja berdasarkan pada sematjam "partai-partai" jang lain, jang sudah didjadikan oleh Allah s.w.t., yakni, golongan suku-suku bangsa. Untuk menjehatkan politik dan memungkinkan berdirinja satu demokrasi jang sesungguhnya di Indonesia, maka, pertama, haruslah kita mengakui bahwa golongan suku-suku bangsa itu adalah golongan-golongan jang mempunyai kepentingan - "interessengemeinschaften" - dalam politik Indonesia; kedua, mengakui golongan-golongan tersebut mendjadi golongan-golongan hukum - "rechts-gemeinschaften" - jang bukan hanja mempunyai hak tetapi djuga mempunyai kewadajiban, jang bukan hanja bisa bertindak sesuka-hatinja tetapi djuga jang harus bertanggung djawab terhadap tindakan-tindakannja menurut ketentuan-ketentuan dan batas-batas jang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Persatuan. Hal ini hanja dapat didjelmakan dengan melakukan pembagian daerah pemerintahan negara atas dasar daerah suku-suku bangsa dan memberikan satu negara bagian kepada tiap-tiap suku bangsa. Dengan demikian masing-masing suku bangsa akan mendapat hak untuk memerintah dirinja sendiri menurut agama, adat-istiadat dan peradabannja masing-masing dengan tiada tjampur tangan suku bangsa, jang lain. Dengan ini tertjapailah suatu pemerintahan

demokrasi jang asli, karena pemerintahan tiap-tiap daerah akan dapat dilakukan dengan persetujuan dari jang diperintahi sendiri, tidak sebagai dalam negara kesatuan sekarang dimana daerah diperintahi dengan *dikte* dari Djawa. Dalam bentuk ini, walaupun umpamanja persetujuan untuk mendjadikan pemerintah pusat Negara Persatuan sebagai satu negara Islam tidak dapat tertjapai, maka suku-suku bangsa Islam jang menghendaki negara Islam akan dapat melaksanakan hasrat mereka didaerahnja masing-masing dengan tidak perlu "berontak" terhadap pemerintah pusat sebagai sekarang. Dalam rangka ini, maka Sumatera umpamanja dapat dibagikan dalam Negara Sriwidjaja (Sumatera Selatan), Negara Minangkabau, Negara Batak, Negara Melaju (Sumatera) Timur dan Riau), Negara Atjeh, dan sebagainya; Djawa akan dapat dibagi dalam Negara Sunda, Negara Djawa dan Negara Madura; Sulawesi akan dapat dibagi dalam Negara Minahasa, Negara Bugis dan Negara Makasar; Indonesia Timur dalam Negara Maluku, Bali, dan sebagainya; Kalimantan dalam Negara Bandjar, Dajak, dan sebagainya. Adanja suku-suku bangsa jang terlalu ketjil tidak dapat mendjadi alasan untuk tidak memberikan hak memerintah diri sendiri kepada suku-suku bangsa jang ketjil-ketjil itu, karena mereka dengan mudah dapat bersatu dalam satu negara bagian dan masing-masing bisa mendapat satu provinsi dalam negara bagian jang demikian itu. Nama-nama jang penulis sebutkan disini tentulah djauh dari tjukup dan hanja penulis maksudkan sebagai tjontoh belaka dan teresah

kepada seluruh suku-suku bangsa kitalah untuk memilih nama jang mereka sukai.

Pembagian daerah pemerintahan negara jang serupa ini, pertama, akan mendjamin hak tiap-tiap suku bangsa kita untuk memerintah diri-sendiri sesuai dengan kedudukan bangsa Indonesia jang sudah merdeka; kedua, pembagian jang serupa ini akan membawa ketenteraman politik bagi seluruh Indonesia dengan didasarkannya tata-usaha negara atas dasar-dasar jang njata, hidup dan bermakna, karena sebagai telah kita buktikan memang politik ditanah air kita berdasarkan pada suku-suku bangsa-ini. Pembagian setjara lain hanja berarti pembagian pura-pura sadja dan akan berachir dengan timbulnja ketidak-adilan setjara besar-besaran sebagai dalam negara kesatuan sekarang; ketiga, pembagian jang serupa ini akan mengurangi kesempatan persengketaan dari satu golongan dengan golongan jang lain dan mengurangi kesempatan penindasan, walaupun dengan tidak disengadja, oleh satu golongan atas golongan jang lain sebagai jang terdjadi sekarang dalam negara kesatuan; keempat, dengan sendirinja daerah pemerintahan ini djuga merupakan daerah pemilihan, sehingga dengan demikian suara dari tiap-tiap suku bangsa sudah dengan pasti-pasti dapat dibawa ke dewan perwakilan pusat karena wakil-wakil jang terpilih dengan sendirinja akan terdir dari negara-negara bagian jang bersangkutan; Kelima, hanja dengan pembagian jang demikianlah pelaksanaan pemerintahan demokrasi jang sehat dapat

didjalankan di kalangan bangsa kita sebagai satu bangsa bersuku.

*Adanja pembagian daerah pemerintahan jang sedemikian berarti adanja harga-menghargai dan hormat-menghormati dikalangan seluruh golongan bangsa-bangsa Indonesia jang akan melahirkan suatu persatuan jang sungguh-sungguh dan kekal abadi.*

Susunan jang seperti kita kemukakan diatas, yakni pemberian satu negara bagian kepada tiap-tiap suku bangsa dalam, suatu negara persatuan jang terdiri dari bangsa-bangsa bersuku telah dilakukan orang dengan hasil jang gilang-gemilang, walaupun tentu sadja dalam bentuk jang agak berlain-lainan, seperti die Yugoslavia, Switserland Canada dan bahkan di Soviet Rusia. Yugoslavia, suatu negara Balkan jang dahulunya telah mengalami begitu banjak perpetjahan dan jang telah ikut memasjurkan kata-kata “mem-balkan-kan” itu dengan makna “memetjah dan mendjadjah”, kini, sedjak dipakainja susunan diatas Yugoslavia sudah bersatu-padu dan telah membuat kata-kata “membalkan-kan” itu sendiri ketinggalan zaman. Kini di Yugoslavia, suku-suku bangsa, Serbia, Montenegro, Croatia, Slovenia Bosnia, dan sebagainya, masing-masing mendapat satu negara bagian dalam negara persatuan Yugoslavia. Demikian djuga di negara Persatuan Soviet, walaupun bangsa Rusia sendiri jang berdjumlah 105 djuta (1941) djiwa, yakni 52.3% dari djumlah warganegara Persatuan Soviet, tetapi mereka tidaklah memonopoli semua kekuasaan dalam negara

Persatuan Soviet itu. Sebaliknya mereka hanya mendapat satu negara bagian saja diantara 16 negara-negara bagian yang terdapat dalam negara Persatuan Soviet itu, dimana kepada masing-masing suku bangsa yang mempunyai jumlah paling kurang satu juta diberikan satu negara bagiannya sendiri. Sedang di Switserland dan Canada pembagian daerah pemerintahan yang demikian itu, dengan sedikit perbedaan tentu saja, sudah dilakukan sedjak berabad-abad lamanya. Pelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman-pengalaman negara-negara ini, walaupun mereka mempunyai falsafah politik yang berlain-lainan, ialah bahwa bagi suatu bangsa yang bersuku, dasar pembagian daerah pemerintahan yang sebaik-baiknya ialah watas-watas sejarah sebagaimana dinjatakan oleh daerah-daerah suku bangsa itu dan ini dapat dilakukan dengan sempurna-purnanya dalam suatu negara persatuan.

Sekali lagi, oleh karena kekuasaan politik di Indonesia pada hakikatnya adalah berdasarkan pada golongan-golongan suku bangsa dan bukan pada partai-partai, maka yang pertama sekali perlu diatur dalam pemerintahan Indonesia ialah kedudukan suku-suku bangsa itu, dan baru keduanya kedudukan partai-partai. Hal ini dapat ditjapai dengan mudah dengan melakukan pembagian daerah pemerintahan sebagai yang kita usulkan diatas. Suatu pemerintahan yang seburuk-buruknya ialah suatu pemerintahan dimana golongan-golongan yang sebenarnya menjalankan kekuasaan tidak diatur dengan hukum, sedang golongan-golongan

yang tidak berkuasa apa-apa diatur dengan hukum. Inilah hukum yang salah pasang, sebagaimana dalam negara kesatuan Sukarno sekarang. Negara yang demikian adalah negara hukuman dan bukan negara hukum.

## B. Dasar Pemilihan Umum

Sebagaimana telah kita bitjarkan dibelakang dizaman kita ini pemerintahan demokrasi dengan sendirinya adalah pemerintahan yang berdasarkan perwakilan, dan pemerintah yang berdasarkan perwakilan, dengan sendirinya pula adalah pemerintahan yang berdasarkan pemilihan. Djadi dasar pemilihan yang sehat menentukan adanya perwakilan yang sehat, sebagaimana perwakilan yang sehat menentukan adanya demokrasi yang sehat pula. Tegasnya, pemilihan, perwakilan dan pemerintahan demokrasi adalah tiga soal yang tidak dapat dipisah-pisahkan; hasil dari yang pertama akan menentukan hasil yang kedua dan yang ketiga.

Dasar pemilihan umum dalam negara kesatuan sekarang, sebagaimana telah kita kemukakan dibelakang, ialah partai-partai buatan yang pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dan tidak mewakili kepentingan golongan-golongan rakyat yang sebenarnya. Tambahan lagi, pemilihan yang sudah salah dasarnya

ini dilakukan pula menurut daerah-daerah pemerintahan negara yang telah membagi-bagi Indonesia dalam sebegitu banyak daerah dengan tidak mengindahkan kepentingan suku-suku bangsa dari siapabangsa Indonesia itu terdiri. Akibatnja ialah terpilihnja wakil-wakil yang tidak mewakili kepentingan golongan-golongan yang sebenarnja dalam masyarakat Indonesia yang achirnja menimbulkan dewan perwakilan yang tidak mengindahkan kepentingan seluruh rakjat pula. Dan tjara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak yang mutlak itu achirnja meletakkan kepentingan satu golongan sadja, yakni suku bangsa Djawa, atas kepentingan seluruh suku-suku bangsa Indonesia yang lain-lain.

Lagi pula partai-partai kita dalam susunannja yang sekarang sebenarnja lebih banyak mewakili kemauan orang-orang yang memegang pimpinan sesuatu partai itu dari pada mewakili kemauan rakjat umum diberbagai daerah dan dari berbagai golongan. Hal ini disebabkan oleh besarnja kekuasaan pemuka-pemuka partai atas tiap-tiap partai itu karena pemuka-pemuka partai mendapat kesempatan yang luas sekali untuk menentukan politik kepartaian dan mempergunakan kekuasaan partai sehingga partai-partai kita sudah lebih merupakan alat kekuasaan belaka bagi mereka yang memegang pimpinannja. Sedang sifat perwakilan rakjat dari partai-partai itu sudah mendjadi sifatnja yang kedua dan bukan lagi sifatnja yang pertama. Dalam pemilihan umum, misalnja, pemuka-pemuka partai mempunyai pengaruh yang besar sekali dalam menentukan siapa yang mendjadi

tjalon partai. Disini pengaruh yang menentukan ada pada pemuka-pemuka partai dan bukan pada anggota-anggotanja. Sesudah itu pemuka-pemuka partai mempunyai kesempatan pula dalam menuliskan nama-nama tjalon itu dalam daftar pemilihan, siapa yang namanja harus ditulis pada nomor satu dan siapa pada nomor seratussatu. Semua ini adalah "kekuasaan" yang pengaruhnja besar sekali atas hasil pemilihan dan siapa yang terpilih. Oleh karena ini pemuka-pemuka partai mempunyai kesempatan untuk memperkuat kedudukan dirinja dalam pimpinan partai dan menguasai seluruh partai. Maka kita lihatlah umpamanja kebanyakan pemuka-pemuka partai-partai kita adalah orang-orang itu djuga sedjak lebih satu windu. Kesempatan madju dari bawah buat tenaga-tenaga lain yang diluar golongan kesukaan pimpinan sesuatu partai hampir-hampir tidak ada. Demikian djuga nasibnja sesuatu partai ditentukan oleh kepentingan pemuka-pemukanja dan bukan oieh kepentingan anggota-anggotanja. Kalau pemuka-pemuka sesuatu partai itu pada sesuatu waktu tidak puas dengan pembagian kursi atau pembagian keuntungan yang lain antara satu sama lainnja, maka merekapun lalu keluar dari partai lama dan mendirikan partai baru. Sebegitu djauh inilah sedjarah kebanjakannja partai-partai kita. Djadi susunan kepartaian kita dalam keadaannja yang sekarang, tjara pembagian daerah pemerintahan dan dengan sendirinja djuga daerah pemilihan, semuanya memungkinkan timbulnja satu susunan kekuasaan politik yang sangat djauh dari pengendalian rakjat. Maka tidak

heran suatu negara jang didasarkan atas dasar jang demikian dengan sindirinja tentu djuga djauh dari masjarakat dan tidak dapat merasai getaran djiwa rakjat.

Tetapi walaupun demikian, penulis tidaklah mengandjurkan pembubaran partai-partai itu sebagaimana pernah diandjurkan oleh Sukarno. Dalam masjarakat merdeka, dalam masjarakat demokrasi, partai-partai tetap diperlukan sebagai *salah-satu* djalan mengeluarkan pendapat-pendapat politik dan sebagai *salah-satu* djalan untuk mempengaruhi politik negara. Kalau bangsa kita adalah satu bangsa jang tunggal dan bukan satu bangsa berseku, maka sebenarnja hanja partai-partai itulah jang sewadjarnja kita pakai sebagai satu-satunja dan bukan hanja sebagai salah-satu djalan untuk mempengaruhi politik negara. Tetapi karena bangsa kita adalah suatu bangsa jang bersuku dimana terdapat kepentingan-kepentingan jang berlainan pula, jang tidak mungkin semuanya disalurkan dalam partai-partai itu sadja, maka tidaklah dapat kita memaikai partai-partai itu sadja sebagai *satu-satunja* dasar perwakilan dan pemilihan. Kita tidak dapat meminta dari partai-partai itu apa jang tidak bisa diberikannya. Dan kita tidak dapat menghukum partai-partai itu hanja karena partai-partai itu tidak dapat memenuhi angan-angan sebagian orang jang sebenarnja tidak memahami keseluruhan persoalan politik dan persoalan negara. Jang harus kita lakukan ialah bukan membubarkan partai-partai itu, tetapi menambah satu dasar baru untuk pemilihan dan perwakilan itu, pakni,

dasar daerah sebagaimana terdjelma dalam pembagian daerah pemerintahan baru sebagai kita usulkan dalam pasal jang lalu. Dengan lain perkataan, perwakilan dan pemilihan itu djangan lagi kita dasarkan pada partai-partai semata-mata, tetapi pada daerah-daerah suku bangsa. Dalam susunan baru, tiap-tiap daerah sukubangsa akan mendjadi djuga satu daerah pemilihan. Dan oleh karena tiap-tiap daerah suku bangsa djuga telah merupakan daerah negara-negara bagian, maka pendasaran pemilihan atas daerah-daerah ini akan membawa dua hasil jang menguntungkan: pertama, memungkinkan berdjalannya pemerintahan demokrasi jang sehat, yakni pemerintahan dengan persetujuan dari jang diperintah dalam daerah-daerah atau negara-negara bagian itu. Kedua, pemilihan jang berdasarkan daerah itu akan memastikan pula terpilihnja putera-putera daerah jang bersangkutan itu sendiri untuk mewakili daerahnja dalam dewan perwakilan pemerintah pusat. Dalam susunan ini hanja orang-orang jang benar-benar berumah-tangga didaerah-daerah jang bersangkutan dapat terpilih mendjadi wakil dari daerah-daerah itu. Susunan ini akan mentjegah timbulnja wakil-wakil daerah jang palsu sebagai sering kita lihat dalam susunan pemilihan jang sekarang, dimana seorang jang tinggal 1000 kilometer djauhnya dari sesuatu daerah masih dapat memperlihatkan batang hidungnya dalam parlemen di Djakarta sebagai "wakil" dari daerah itu. Bagaimanakah "wakil-wakil" jang seperti ini dapat mengetahui keinginan dan kepentingan orang-orang jang "diwakilinja"

jang tidak pernah dikenalnya dan merekapun tidak mengenalnya? Sebenarnya jang berdjalan selama ini adalah satu sistem pemilihan pura-pura belaka.

Njatalah dengan mendasarkan pemilihan pada daerah-daerah, bagi pemerintah daerah terdjaminlah pemerintahan daerah jang demokratis, dan bagi pemerintah pusat terdjamin pula perwakilan tiap-tiap golongan suku bangsa dalam dewan perwakilan pusat. Dalam pada itu hal ini dapat ditjapai dengan tidak perlu membubarkan partai-partai, walaupun kekuasaan partai-partai itu dalam kenjataannya akan lebih kurang dari sekarang.

Dalam pelaksanaannya, susunan ini menghendaki pendasaran pemilihan itu, pertama-tama, atas dasar daerah, dan hanja keduanya atas dasar partai-partai. Kalau umpamanya Indonesia akan terbagi dalam 17 negara bagian, maka akan terdapatlah 17 daerah pemilihan besar. Wakil-wakil dari negara-negara bagian itu ke dewan perwakilan pusat hendaklah dipilih oleh rakyat negara-negara bagian itu masing-masing dari tjalon-tjalon jang berumah-tangga dalam negara-negara bagian itu sendiri. Dengan demikian, wakil-wakil itu bukan sadja mewakili negara bagiannya masing-masing, tetapi djuga dengan sendirinya mewakili sukubangsanya dalam dewan perwakilan pusat. Sedang partai-partai dapat bergerak bebas sebagai biasa dengan mengemukakan tjalon-tjalannya dalam ke 17 daerah pemilihan itu. Tetapi karena sekarang dalam sistem baru, dasar pemilihan adalah daerah, maka

tjalon-tjalon jang terpilih ialah jang mendapat suara terbanyak dalam daerah pemilihannya masing-masing. Oleh karena ini maka partai-partai ketjil jang hanja mempunyai anggota jang bertaburan sedikit disana dan sedikit disini dengan tiada kesanggupan untuk mendjadi golongan terbanyak disalah satu daerah pemilihan itu, - sebagai halnya kebanyakan partai-partai ketjil kita sekarang, - dengan sendirinya akan terpaksa gulung tikar, karena partai-partai demikian akan ternjata partai-partai jang sia-sia belaka, karena tidak akan sanggup mentjapai kemenangan lagi dalam pemilihan. Partai-partai ketjil ini akan dipaksa oleh keadaan untuk memilih salah-satu diantara dua djalan: adakala bubar atau meleburkan diri dalam salah satu partai besar. Dengan djalan ini kita akan mentjapai perbaikan kepartaian dan ketenteraman politik dengan lenjapnya partai-partai ketjil jang terlalu banyak dewasa ini. Dan hal ini dapat kita tjapai dengan tiada perlu melalui sesuatu tindakan "pembersihan" atau sesuatu undang-undang tersendiri.

Demikian djuga pemuka-pemuka partai jang selama ini bertachta di Djakarta dan mendiktekan daerah-daerah akan terpaksa turun dari singgasana mereka karena susunan ini akan membuat partai-partai lebih demokratis dan memindahkan perdjuaan partai-partai dari pusat ke daerah-daerah. Rakyat daerah akan memperoleh kembali hak politiknya sebagai rakyat merdeka jang selama ini dalam negara kesatuan sudah diserobot dari mereka dengan mempertopengkan slogan-slogan kosong. Partai-partai akan terpaksa bekerdja lebih keras dan pemuka-

pemuka partai akan terpaksa berlaku lebih djudjur untuk dapat mempertahankan pengaruh dan kekuasaan mereka. Kalau selama ini kekuasaan pemerintah pusat mendjadi monopoli partai-partai golongan suku bangsa Djawa sadja, hal jang demikian itu tidak dapet terdjadi lagi, karena dalam susunan baru ini sesuatu partai baru dapat menguasai pemerintah pusat kalau partai itu berhasil mendapat kemenangan pemilihan dalam sebagian besar dari negara-negara bagian jang ada. Hal ini tidak akan dapat ditjapai ketjuali oleh partai-partai besar jang mempunyai pengikut merata dikalangan sebagian besar suku-suku bangsa Indonesia. Sedang partai-partai ketjil tidak mempunyai harapan sama sekali.

Pada umumnja hasil dari pada sistem ini ialah: pertama, mengurangi djumlah partai-partai dengan melenjapkan partai-partai ketjil jang peranannya selama ini hanja menambah kegontjangan politik sadja. Hal ini akan menolong membawa ketenteraman politik bagi Indonesia. Kedua, memaksakan adanya kerdjasama diantara partai-partai besar, karena tidak ada satu partai jang bisa mentjapai kekuasaan dengan sendirinja dengan tiada bantuan dan kerdjasama partai-partai jang lain. Ketiga, susunan ini memaksakan pula adanya kerdjasama, tolong-menolong antara seluruh suku-suku bangsa Indonesia karena sesuatu partai besar jang bisa mentjapai kekuasaan itu tidaklah bisa didirikan ketjuali dengan kerdjasama segala golongan suku-suku bangsa itu. Dalam susunan ini sesuatu partai baru partai mendjadi besarkalau

ia mempunyai pengikut dan menguasai suara terbanjak di negara-negara bagian jang terbanjak pula. Partai-partai jang hanja mempunyai anggota disatu daerah atau dikalangan satu suku bangsa sadja, walaupun betapa djumlahnja, tetap mendjadi partai setempat sadja. Susunan ini akan memaksakan partai-partai untuk memelopori kerdjasama jang adil antara segala golongan bangsa Indonesia. Partai-partai jang selama ini sering ditjap sebagai pemetjah akan mempunyai peranan baru sebagai pelopor persatuan jang adil. Hal ini djauh benar bedanja dengan sistem kepartaian jang berlaku dalam negara kesatuan sekarang, dimana satu partai setempat sadja jang berkuasa di Djawa Tengah dapat merebut kekuasaan pemerintah pusat dan dapat mempersetan seluruh Indonesia. Keempat, susunan pemilihan baru ini memungkinkan berdirinja pemerintahan jang lebih demokratis, didaerah dan dipusat, berkat terpilihnja wakil-wakil rakjat jang benar-benar mewakili rakjat Indonesia jang terdiri dari berbagai-bagai suku itu.

### C. Dewan Perwakilan Rakjat

Sebegitu djauh penulis telah mentjoba membuktikan bahwa politik di Indonesia, pada hakikatnja, adalah politik antara golongan-golongan suku bangsa dan bukan politik antara partai-partai sebagai sangkaan umum.

Paling banak partai-partai hanja merupakan alat-alat dari sesuatu suku bangsa atau beberapa suku bangsa dalam mendjalankan politiknja. Hal jang demikian itu bukanlah suatu penjakit masjarakat, tetapi suatu hal jang biasa dikalangan sesuatubangsa bersuku karena pengaruh-pengaruh kesukuan dan segala kepentingan jang bersangkutan-paut dengan kehidupan kesukuan itu lebih besar dari pengaruh kepartaian jang baru didirikan kemarin itu. Bukanlah suatu kemustahilan bahwa dimasa depan politik Indonesia akan sungguh-sungguh merupakan politik antara partai-partai, tetapi diabad keduapuluh ini kenjataanja ialah bahwa politik Indonesia masih tetap politik antara golongan-golongan. Pada dasarnya kedua matjam politik itu tidaklah ada perbedaannja dan tidaklah ada salahnja; tetapi kesalahan mulai bila salah satu partai dapat mengindjak-ngindjak hak partai jang lain dengan tak ada sanggahan, dan bila satu golongan dapat memperkosa hak golongan jang lain dengan tiada hukuman. Maka tudjuan dari pemerintahan ialah menegakkan keadilan diantara partai-partai atau diantara golongan-golongan itu. Dan oleh karena politik di Indonesia adalah politik antara golongan-golongan, maka tudjuan jang terachir dari pemerintahan dibumi Indonesia ialah untuk mendjaga keadilan diantara golongan-golongan itu. Tetapi sebagai telah penulis katakan pada pembukaan buku ini, di Indonesia kita sudah mempunjai sistem keadilan antara perseorangan tetapi belum lagi antara golongan-golongan karena negara kesatuan sekarang berpura-pura se-akan-akan

golongan-golongan itu tidak ada. Akibatnja ialah terdjadi perkosaan *hak* oleh satu golongan terhadap golongan-golongan jang lain dengan tiada hukuman dan inilah jang achirnja menimbulkan pemberontakan-pemberontakan jang tiada berkehabisan.

Dua kenjataan jang tidak dapat dilupakan dalam menjusun dewan perwakilan rakjat bagi Indonesia, jaitu, kenjataan adanja rakjat Indonesia jang berdjumlah delapan-puluh djuta itu, dan kenjataan terbaginja mereka dalam beberapa suku bangsa. Kequa-dua kenjataan ini haruslah diwakilkan, atau lebih tegas, haruslah ditjerminkan dalam tiap-tiap dewan perwakilan Indonesia. Kedua-duanja adalah kenjataan; kedua-duanja sama pentingnja bagi kehidupan manusia Indonesia; kedua-duanja tak dapat dipisahkan satu dari pada jang lainnja. Oleh karena itu, untuk mengatur kerdjasama dan mendjamin kebulatan antara kedua sifat masjarakat kita ini, Indonesia memerlukan dewan perwakilan jang terdiri dari dua madjlis: Dewan Rakjat dan Dewan Bangsa.

Dewan Rakjat akan mawakili rakjat jang delapan-puluh djuta itu sebagai perseorangan, dengan tidak memandang suku dan dipilih menurut djumlah kepala, misalnja satu wakil untuk tiap-tiap 300,000. rakjat. Walaupun pemilihan wakil-wakil ini harus didjalankan menurut dasar dan daerah pemilihan jang sudah kita kemukakan dibelakang guna mendjamin terpilihnja wakil-wakil jang sungguh-sungguh, tetapi tiap-tiap suku bangsa pasti akan mendapat perwakilan jang sepadan